

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan, dalam hal ini yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Alhudori, 2017). Definisi pembangunan adalah pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas manusia, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah dengan penurunan laju jumlah penduduk miskin dan tidak terlepas juga dari pertumbuhan ekonomi (Puspita, 2015).

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi dalam memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, papan, dan sandang serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) (Kurniawan, 2018). Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai dimana seseorang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan berbagai penyebab salah satunya adalah rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh (Nata dan Ningrum, 2015).

Kemiskinan merupakan hal klasik yang belum tuntas terselesaikan terutama di Negara berkembang yaitu Indonesia. Kemiskinan di Indonesia sekarang ini telah menjadi suatu masalah nasional yang bahkan pemerintah pun tengah mengupayakan usaha pengentasan penduduk Indonesia dari masalah kemiskinan (Puspita, 2015). Di Indonesia sendiri tingkat kemiskinan tidaklah sedikit yang disebabkan oleh perilaku hidup masyarakatnya, sehingga hal ini menyebabkan tingkat penduduk miskin setiap tahunnya meningkat dan di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi (Kurniawan, 2018). Berbagai perencanaan, kebijakan serta program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan pada intinya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin (Nalle dan Kiha, 2018).

Permasalahan kemiskinan ini harus diberantas sampai habis sampai akarnya. Maka dari itu ini bukan hanya tugas pemerintah saja yang berjuang mengurangi serta memberantas kemiskinan tetapi ini juga tugas masyarakat yang mana mereka harus berusaha meningkatkan kualitas dirinya sehingga tidak menjadi beban untuk dirinya bahkan untuk negara, disamping masyarakat berusaha meningkatkan kualitas dirinya, pemerintah juga harus mendorong dari sisi sumber dayanya dan pemerataan. Pentingnya pengentasan kemiskinan menjadi persoalan utama yang dibahas di seluruh dunia, yang dibuktikan dalam SDGs dengan dinyatakannya no poverty (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas (Nina dan Rustariyuni, 2018).

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat (Jiwa)
Tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)
2012	4430200	9,88
2013	4375200	9,61
2014	4238960	9,18
2015	4435700	9,53
2016	4224330	8,95
2017	4168440	8,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS)

Jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Barat masih tergolong besar jika dibandingkan dengan Provinsi di Indonesia. Dapat kita lihat dari data diatas yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) menyatakan pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat sebanyak 4430200 jiwa atau 9,88 % dan mengalami penurunan pada tahun 2013 sebanyak 4375200 jiwa atau 9,61% dan mengalami penurunan lagi di tahun 2014 sebanyak 4238960 jiwa atau 9,18 % dan pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 4435700 jiwa atau 9,53 % dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 4224330 jiwa atau 8,95 % dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2017 sebesar 4168440 jiwa atau 8,71 %. Penurunan tersebut mungkin dikarenakan adanya faktor dari Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum dan Gini Ratio.

Salah satu sumber yang menyebabkan pengaruh jumlah penduduk miskin salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu terobosan dalam menilai pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia yang berkualitas dapat dicapai jika

masyarakatnya berkualitas dan memiliki bekal pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan ilmu keterampilan (Kurniawan, 2018). Indeks pembangunan manusia memiliki korelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Karena itu diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan rendah (Alhudori, 2017).

Indeks pembangunan manusia salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Pada penelitian yang dilakukan Zuhdiyaty dan Kaluge 2017 yang berjudul “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)” yang mana memiliki hasil bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yang mana jika semua masyarakat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas maka akan mengurangi kemiskinan di setiap daerah di Indonesia, terutama Jawa Barat.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2012-2017

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (%)
2012	67,32
2013	68,25
2014	68,80
2015	69.5
2016	70.05
2017	70.69

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS)

Berdasarkan data dari BPS dapat dilihat pada tabel 1.2. Tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat diangka 67,32% dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 diangka 68,25% lalu Pada tahun 2014 mengalami peningkatan lagi diangka 68,80% dan pada tahun 2015 tingkat IPM Jawa Barat diangka 69.50% kemudian mengalami peningkatan ditahun 2016 diangka 70.05% dan ditahun 2017 juga mengalami peningkatan diangka 70.69%.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah upah minimum. Pada penelitian yang dilakukan Ardhian Kurniawati 2017 yang berjudul “Dampak Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2006-2014” yang mana memiliki hasil bahwa Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yang mana jika Upah Minimum meningkat maka dapat mengurangi dan mengatasi kemiskinan. Upah minimum di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat ditetapkan dengan dua maksud. Pertama untuk meningkatkan standar hidup buruh. Kedua, upah minimum sebagai jaring pengaman (safety net) yang bertujuan untuk melindungi pekerja dengan upah rendah (A Kurniawati, dkk 2017).

Kondisi upah minimum disetiap daerah di Jawa Barat berbeda beda disetiap kabupaten atau kotanya. Upah yang diberikan kepada seorang karyawan atau pekerja ini harus seseua pereundangundangan dan harus didasari atas perjanjian-perjanjian yang tepat serta imbalan yang sesuai. Upah minimum yang sangat rendah dapat mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan serta jumlah penduduk miskin (Kurniawan, 2018). Kemiskinan dapat dilihat dari tingkat pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan. Jika kebutuhan hidup minimum

dapat terpenuhi, maka kesejahteraan masyarakat meningkatkan dan terbebas dari masalah kemiskinan (Sudirman dan Lili Andriani, 2017).

Tabel 1.3

Upah Minimum dan Gini Ratio Provinsi Jawa Barat
Tahun 2012-2017

Tahun	Upah Minimum (Rupiah)	Gini Ratio (%)
2012	780.000	0.422
2013	850.000	0.406
2014	1.000.000	0.398
2015	1.000.000	0.426
2016	1.300.000	0.402
2017	1.420.624	0.393

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tabel 1.3 bahwa upah minimum provinsi atau UMP Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 sebesar Rp. 780.000,00 dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 850.000,00 lalu dan pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.000.000,00 dan pada tahun 2015 upah minimum provinsi tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan lagi sebesar Rp. 1.300.000,00 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.420.624,00.

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan (Badan Pusat Statistik, 2018). Indikator untuk mengukur pemerataan pendapatan menggunakan Indeks Gini atau Gini Ratio. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tabel 1.3 pada tahun 2012 Gini Ratio Provinsi Jawa Barat sebesar 0.422 dan menurun pada

tahun 2013 sebesar 0.406 lalu pada tahun 2014 mengalami penurunan lagi sebesar 0.398 dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang mana menjauhi angka 0 yaitu sebesar 0.426 dan menurun pada tahun 2016 sebesar 0.402 lalu terakhir pada tahun 2017 mengalami penurunan lagi sebesar 0.393. Data indeks gini provinsi Jawa Barat masih jauh dari angka 0 yang mana menandakan masih adanya ketimpangan walaupun tergolong rendah dan sedang. Disini bisa kita terlihat masih adanya pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang terjadi di provinsi Jawa Barat.

Pemerataan pendapatan ini juga dijelaskan di dalam ayat Al Qur'an surat Al-Hasyr Ayat 7 yang mana berbunyi :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Ketika prinsip ini dilaksanakan maka pengaruhnya terhadap permasalahan kemiskinan akan sangat terasa. Salah satu penyebab kemiskinan adalah

ketidakmerataan dalam pengelolaan harta yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pada penelitian yang dilakukan A Rodriguez-Pose dan D. Hardy 2015 yang berjudul “Poverty and Inequality in the Rural Economy from a Global.” yang mana memiliki hasil bahwa Gini Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan yang artinya jika Angka Gini Ratio menurun mendekati angka 0 maka dapat menurunkan kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini akan membahas Determinan kemiskinan Provinsi Jawa Barat (studi kasus 26 kabupaten dan kota diprovinsi Jawa Barat tahun 2012-2017).

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini meneliti di 26 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Penelitian ini memiliki batasan tahun yakni dari tahun 2012 sampai 2017
3. Penelitian ini meneliti variabel Kemiskinan sebagai variabel dependent dan Variabel Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum serta Gini Ratio sebagai variabel independent.

C. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa konteks pembahasan yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat ?

2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat ?
3. Bagaimana pengaruh Gini Ratio terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Menganalisis bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Jawa Barat.
2. Menganalisis bagaimana pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Jawa Barat
3. Menganalisis bagaimana pengaruh gini ratio terhadap kemiskinan di Jawa Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menjadi salah satu bahan acuan atau referensi dalam penelitian selanjutnya.
 - b. Dapat menjadi dokumen yang memberikan kontribusi dalam pembangunan Jawa Barat
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah, Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan dalam mengambil kebijakan dalam permasalahan kemiskinan di Jawa Barat.

Bagi peneliti, dapat memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan lebih dalam mengenai masalah kemiskinan.